BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I

LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan yang digunakan sebagai sarana evaluasi dan bentuk pertanggung jawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sasaran dan target kinerja meliputi perjanjian kinerja, pengukuran kinerja input, output dan outcome yang telah ditetapkan dan direalisasikan, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan kegagalan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada pengukuruan target pada triwulan berikutnya.

Aceh Selatan, 30 April 2025

Kepala Loka POM di Kab. Aceh Selatan

Indera Permana, S.Farm., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan I Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pencapaian sasaran strategis dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029. Guna mendukung capaian tersebut, pada Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan 8 Sasaran Kegiatan dengan 23 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah **106,54%** dengan predikat **Istimewa**. Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >100% atau predikat Sangat Baik;
2. Terdapat 3 (Tiga) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
3. Terdapat 3 (Tiga) Indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I;
4. Terdapat 9 (Sembilan) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2025.

Kinerja masing-masing Indikator sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja :
   a) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 123.46% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
   b) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 133.33% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
   c) Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT, dikecualikan dalam perhitungan NKO.
   d) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 117.65% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
   e) Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder; capaian sebesar 383.87% (Tidak Dapat Disimpulkan), dinormalisasi menjadi 110%.
   f) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan I.
   g) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dikecualikan dalam perhitungan NKO.
   h) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dikecualikan dalam perhitungan NKO.
   i) Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; capaian sebesar 117.65% (Tidak Dapat Disimpulkan, dinormalisasi menjadi 110%.

j) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan, capaian sebesar 125.53% (Tidak Dapat Disimpulkan).

2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; capaian sebesar 109.90% (Sangat Baik).
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dengan 4 (empat) indikator kinerja :
   a) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, capaian sebesar 102.01% (Sangat Baik).
   b) Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan I.
   c) Jumlah desa pangan aman, belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak ada target pada Triwulan I.
   d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas, belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan I.
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan indikator kinerja Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, capaian sebesar 100% (Baik).
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan I.
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan

Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar, capaian sebesar 100% (Baik).

7. Layanan Publik UPT yang Prima dengan Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan 4 (empat) Indikator Kinerja :
   a) Nilai AKIP UPT BPOM, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
   b) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
   c) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM, target di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.
   d) Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT, capaian sebesar 100% (Baik).

Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan terkait Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2025 tanggal 02 Desember 2024 No. SP DIPA- 063.01.2.690481/2025, untuk Tahun Anggaran 2025, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 3.444.778.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). mengalami perubahan dalam rangka penambahan anggaran belanja barang berupa honor PPNPN sebesar Rp.35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp.3.479.978.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Secara garis besar Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja

yang telah ditetapkan dan menghasilkan capaian realisasi anggaran 14,82% dan realisasi output 10,23%. Pada pelaksanaannya, terdapat kendala yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yaitu terdapat perubahan/revisi anggaran DIPA dikarenakan Pemblokiran otomatis atas efisiensi APBN oleh Kementerian Keuangan, Pemblokiran Mandiri atas efisiensi APBN oleh Internal Badan POM dan Penambahan anggaran untuk alokasi pembayaran Honor PPNPN di Lingkungan Badan POM sehingga dibutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan operasional maupun teknis di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telah dirumuskan langkah-langkah antisipatif agar memenuhi target, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja agar seluruh indikator kinerja utama (IKU) maupun sasaran strategis di Tahun 2025 dapat tercapai. Diperlukan upaya peningkatan kinerja dari seluruh elemen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan agar seluruh sasaran strategis di periode yang akan datang dapat tercapai sesuai target.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
RINGKASAN EKSEKUTIF ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR GAMBAR ..... **ixiii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Gambaran Umum Organisasi 2
1.3. Struktur Organisasi 4
1.4. Isu Strategis 8
BAB II PERENCANAAN KINERJA **13**
2.1. Uraian Singkat Renstra 13
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 165
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) 16
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 18
2.5. Metode Pengukuran 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **24**
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 24
3.5. Pemanfaatan Informasi Kinerja 78
3.6. Realisasi Anggaran 79
BAB IV PENUTUP **90**
LAMPIRAN **92**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan . 4
Gambar 1. 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan 7
Gambar 2.4 Predikat Kinerja Organisasi 22
Gambar 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja 23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan 5
Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan..... 5
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025..... 16
Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024..... 18
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025 25
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi (NKO Triwulan I) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan bertanggung jawab terhadap pengawasan Obat dan Makanan dengan wilayah kerja Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala Loka selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan sebagai sub sistem dari sistem Badan POM RI yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah. Pelaporan kinerja merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan SAKIP.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dengan membandingkan capaian dan target dan evaluasi.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM) di Kabupaten Aceh Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Aceh. Berkedudukan di Kota Tapaktuan dengan alamat Jl. Ahmad Yani No 5, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh 23715.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Badan POM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas seorang Kepala Loka yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

Untuk mendukung tugas dan fungsi UPT Badan POM memerlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai Maret 2025 adalah sejumlah 20 orang. Data profil pegawai berdasarkan status

jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. Dalam pemenuhan target kinerja maka dilakukan peningkatan kompetensi pegawai berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek. Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 13 orang, namun total ABK 2025 yang dibutuhkan sebanyak 29 orang dengan latar belakang pendidikan farmasis/apoteker/kesehatan masyarakat/teknologi pangan, akuntansi/ekonomi, arsiparis, teknologi informasi, dan analis kepegawaian.

Tabel 1. 1 Data Pegawai Berdasarkan Status Jabatan dan Pendidikan

No.	Status Jabatan	Pendidikan					Jumlah
		S2 Apoteker	Apoteker	S1	DIII	SLTA/ Sederajat	
1	PNS	-	4	7	2	-	13
2	CPNS	-	-	-	-	-	-
3	PPNPN Pramubakti	-	-	-	1	-	1
4	Petugas Keamanan	-	-	-	-	2	2
5	Pengemudi	-	-	-	-	2	2
6	Petugas Kebersihan	-	-	-	-	1	1
7	Front Office	-	1	-	-	-	1
Total		**-**	**5**	**7**	**3**	**5**	**20**

Pegawai ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menduduki jabatan fungsional sesuai jenjang jabatan dan pendidikannya. Profil jabatan fungsional dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2 Profil Jabatan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Loka	1
2	PFM Ahli Madya	-
3	PFM Ahli Muda	2
4	PFM Ahli Pertama	7

5	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1
6	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
7	Pranata Komputer Terampil	1
Total		**13**

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 13 orang, namun total ABK 2024 yang dibutuhkan sebanyak 29 orang dengan latar belakang pendidikan farmasis/apoteker/kesehatan masyarakat/teknologi pangan, akuntansi/ekonomi, arsiparis, teknologi informasi, dan analis kepegawaian.

Dalam pemenuhan target kinerja maka dilakukan peningkatan kompetensi pegawai berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi seperti kegiatan Bimtek. Diklat dan Workshop baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring oleh internal unit kerja maupun eksternal.

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan saat ini beralamat di Jl. Ahmad Yani nomor 5 Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Menempati satu unit bangunan ruko milik Pemerintah Daerah yang memiliki luas bangunan sekitar 96 m^2 dengan dua lantai dan luas halaman hanya sebesar 40 m^2 . Status bangunan tersebut adalah pinjam pakai. Disamping itu Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mendapatkan hibah tanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan luas 2.437 m^2 , berada di daerah perbukitan yang dikenal dengan nama daerah Puncak Gemilang. Terletak di Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Hibah tanah diperoleh pada tanggal 11 Juni tahun 2019 setelah Berita Acara Hibah dengan nomor 032/03/Hibah/VI/2019 ditandatangani oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak H.Azwir, S.Sos. dan Kepala Balai Besar POM di Banda Aceh Bapak Drs. Zulkifli, Apt.

Selanjutnya dilakukan proses Sertifikasi Tanah tersebut atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Badan Pengawas Obat dan Makanan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan Rahmat Allah SWT, sertifikat tanah akhirnya terbit pada tanggal 12 November 2019 dengan nomor 01.05.07.16.4.00002 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Ismet Zulkarnain, SH. dan telah diserahkan ke Badan POM RI melalui Balai Besar POM di Banda Aceh.

Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah disediakan fasilitas berupa ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK).

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai Unit Layanan Pengaduan Konsumen Masyarakat berkomitmen dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang professional, transparan, obyektif, efektif, efisien, dan akuntabel kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Sesuai dengan instruksi Kepala Badan POM yang di atur pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk konsultasi, saran dan keluhan terhadap Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan di UPT Loka POM Aceh Selatan maka dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.

Gambar 1. 2 Layanan Pengaduan Konsumen Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga memiliki fasilitas penunjang transportasi yakni dua unit mobil dinas operasional, satu unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil laboratorium keliling untuk kegiatan pengujian sederhana sampel pangan dan PJAS di kantin sekolah, pasar dan pangan berbuka puasa.

1.4. Isu Strategis

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan POM untuk melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan, Badan POM melakukan pengawasan secara full spectrum yang dimulai dari pre-market hingga post-market control, pemberdayaan masyarakat dan upaya penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan POM bekerjasama dengan lintas sektor terutama Pemerintah Daerah untuk memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan.

Terdapat 3 strategi menghadapi permasalahan pokok Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sesuai peran dan kewenangannya yaitu:

1. Strategi pencegahan

   Strategi pencegahan dilakukan dengan kegiatan seperti peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
2. Strategi deteksi/pengawasan.

   Untuk strategi detensi/pengawasan dilakukan dengan perkuatan lintas sektor, perkuatan implementasi regulasi dan intensifikasi pengawasan berbasis resiko.
3. Strategi respon/penindakan.

   Strategi penindakan difokuskan pada tahap produksi dan distribusi melalui pemetaan kasus dan potensi rawan kasus, operasi Intelijen dan investigasi yang tetap berkoordinasi dengan Polri.

Terdapat beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan antara lain:

1. Kelembagaan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah peraturan Badan POM dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM.
2. Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

   Pengawasan Obat dan Makanan bersifat full spectrum, mulai dari pre-market hingga post-market. Sistem pengawasan full spectrum ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang yang tidak aman, bermutu dan berkhasiat. Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan.

   Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

   Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

3. Kosmetik dan Obat Bahan Alam yang beredar Tanpa Izin Edar dan mengandung bahan berbahaya.

   Dari pengawasan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masih ditemukan Kosmetik dan Obat Bahan Alam Tanpa Izin Edar dan Bahan Berbahaya, seperti Merkuri dan Sildenafil. Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat dan perlu penanggulangan yang segera dan efektif.

4. Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah yang belum efektif.

   Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamanahkan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Tindak lanjut Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (I-RTP) yang belum optimal.

   Dari pengawasan yang dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), masih ditemukan beberapa produk yang belum memenuhi ketentuan CPPOB-IRT seperti belum memiliki nomor izin edar, belum memenuhi standar hygiene dan sanitasi, belum memiliki kemasan dan label yang sesuai ketentuan dan pemilik yang belum memiliki Sertifikat Bimtek PKP. Hasil pengawasan ini disampaikan kepada Pemda untuk selanjutnya dilakukan tindak lanjut oleh Pemda. Akan tetapi, tindak lanjut belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemda karena kompetensi dan SDM Pemda yang belum memadai dan pola mutasi internal Pemda yang terlalu sering.

6. Kondisi geografis di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan.

   Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berbatasan dengan Sumatera Utara yang berpotensi sebagai pintu masuk Obat dan Makanan. Selain itu, wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan juga mencakup wilayah kepulauan yang

membutuhkan perhatian khusus dalam pengawasan Obat dan Makanan.

7. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

   Bangunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan masih berstatus pinjam pakai dan belum memenuhi kiteria bangunan dan ruang kerja instansi pemerintah. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan belum memiliki laboratorium sehingga pengujian dari pihak ketiga hanya dapat dilakukan oleh Balai Besar POM di Banda Aceh yang membutuhkan waktu pengiriman dan pengujian.

8. Penjualan produk Obat dan Makanan secara online.

   Tidak bisa dipungkiri bahwa jual beli secara online mempermudah masyarakat untuk bertransaksi. Namun sangat disayangkan aplikasi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Masyarakat harus dicerdaskan agar tidak tertipu promosi berlebihan berupa khasiat yang lebih, harga yang murah dan iming-iming bonus dari penjual. Walaupun transaksi dilakukan secara online namun moto CEK KLIK harus tetap dilakukan, Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kedaluarsa. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan selalu melakukan patrol siber untuk mengawasi produk Obat dan Makanan yang beredar secara online.

9. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha

   Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

10. Pendampingan UMKM

    Produk unggulan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan salah satunya adalah pala yang memiliki potensi pasar yang besar. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pemerintah mencanangkan

salah satu program utama yaitu peningkatan produktivitas UMKM sehingga produk-produk UMKM dapat berdaya saing di pasar internasional. Untuk mendukung UMKM yang berdaya saing banyak aspek pembinaan yang harus dilakukan diantaranya pendampingan terhadap UMKM sehingga memiliki kapabilitas untuk menjamin mutu, keamanan, dan manfaat pada komoditas Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang diproduksi

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

> "***Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045***"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

a. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang

tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

b. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
c. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
d. **Masyarakat Sehat**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi).

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2025 - 2029 dijabarkan Misi BPOM. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden dimana BPOM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas"**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5.** Misi BPOM yang juga menjadi Misi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu;
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM;
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025

Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rancangan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029. Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan nomor HK.02.02.2C.09.24.77 Tanggal 18 September 2024.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Kepala Badan POM RI kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025- 2029. Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

NO	SK		INDIKATOR KINERJA	Target
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi	72

			dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		10	Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,76
		2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		3	Jumlah desa pangan aman	1
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang diselesaikan Sesuai Standar	90
7	Layanan Publik UPT yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,51
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	2	Nilai AKIP UPT BPOM	77,5
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,825
		5	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) disusun guna mendukung tercapainya sasaran strategis. Adapun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	75,996,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	44,513,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,359,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	12,718,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	10	15	20	25	30	40	50	60	70	72	72	1,580,500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,580,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	11,063,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	220,982,100
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	96,940,900
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	1,580,500
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			3	3	3	6	6	6	9	9	9	11	124,953,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	108,298,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	2	93,572,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	50	75	75	100	100	100	100	100	1	150,802,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	1	99,224,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	10	30	45	60	75	80	85	90	91	91	24,918,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	0	0	15	40	75	75	75	75	79,830,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45,455,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.51	38,607,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.5	548,286,750
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												4	570,352,750
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.825	543,582,750
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100	543,582,750
														Total	3,444,778,000

2.5. Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi

setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penjelasan cara perhitungan setiap indikator akan dijelaskan pada masing-masing indikator di BAB Akuntabilitas Kinerja. Namun secara umum, cara perhitungan adalah sebagai berikut :

Apabila semakin Tinggi angka realisasi menunjukan capaian yang semakin Baik. maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila semakin Tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin Rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

a. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1. Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2. Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak dapat Disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x < 90%	
Kurang	< 60%	

b. Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM terdiri dari:

a. NKO Periodik

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

b. NKO tahunan

NKO tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BIrokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 komponen yaitu:

1. Capaian Perjanjian Kinerja

   Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

   Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah.

Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah.

c. Predikat Kinerja Organisasi

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai tabel berikut.

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	> 110%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% < x ≤ 20%	

Gambar 2.4 Predikat Kinerja Organisasi

Predikat kinerja organisasi tersebut akan menentukan pola distribusi kinerja yang digunakan sebagai pertimbangan bagi Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam menentukan predikat kinerja pegawai di bawahnya.

d. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Akuntabilitas kinerja ditetapkan dengan melakukan perbandingann Realisasi Kinerja Triwulan dengan target Tahun 2025. Penetapan predikat capaian kinerja organisasi dinyatakan sebagai berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x< 70).	

Gambar 2.5 Analisis Akuntabilitas Kinerja

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi diuraikan analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2025. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja.

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu, dalam analisis capaian kinerja juga dijelaskan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal), serta informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 8 (delapan) sasaran strategis dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian kinerja yaitu 8 (Delapan) Indikator Kinerja tercapai Sangat Baik, 3 (Tiga) Indikator Kinerja tercapai Baik, 3 (Tiga) Indikator dikecualikan dalam perhitungan NKO, dan 9 (Sembilan) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume		
			Target s.d Tw I (Mar)	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	100.00	123.46%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100.00	133.33%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	*Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW I*		
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100.00	117.65%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	15	57.58	383.87%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II*		
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW I*		
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	*Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW I*		
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100.00	117.65%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45	99.73	125.53%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3	3.30	109.90%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76	86.46	102.01%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	*Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II*		
		Jumlah desa pangan aman	*Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II*		
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	*Kegiatan dilaksanakan pada triwulan II*		
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10.00	100.00%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan	*Kegiatan dilaksanakan pada triwulan III*		

	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Farmasi dan Pangan Olahan di UPT			
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50.00	100.00%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	*Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun*		
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	*Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun*		
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	*Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun*		
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	*Perhitungan capaian dilakukan di akhir tahun*		
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	25.00	100.00%

Berdasarkan data capaian pada setiap Indikator Kinerja tersebut, dilakukan pengukuran capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan capaian sebesar 106,54% dan mendapatkan predikat Istimewa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO Triwulan I) Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Normalisasi Capaian PK
			Target s.d Tw I (Mar)	Realisasi	Capaian	
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	100.00	123.46%	110%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100.00	133.33%	110%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100.00	-	-
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100.00	117.65%	110%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	15	57.58	383.87%	110%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	-	-	-

		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	-	-	-
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100.00	117.65%	110%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45	99.73	125.53%	110%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3	3.30	109.90%	109.90%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76	86.46	102.01%	102.01%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0.00	N/A	-
		Jumlah desa pangan aman	0	0.00	N/A	-
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0.00	N/A	-
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10.00	100.00%	100%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0.00	N/A	-
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50.00	100.00%	100%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	25.00	100.00%	100%
			Total Capaian PK			**1172%**
			Nilai Kinerja Organisasi			**106.54%**
			Predikat NKO			**Istimewa**

Analisis Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah diperjanjikan 8 sasaran strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian pada tahun 2025 beserta hambatan dan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%	100%	123,46%	Tidak dapat disimpulkan

Indikator tersebut diukur dengan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut:

a. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
b. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
c. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan pedoman sampling di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
d. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
    1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)

2. Produk kedaluwarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

e. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji.
g. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Target triwulan I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 81% dengan realisasi sebesar 100% sehingga diperoleh persentase capaian triwulan I sebesar 123,46% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Jumlah sampel sediaan farmasi yang diujii sebanyak 29 sampel dengan perincian sampel obat sebanyak 8 sampel, obat bahan alam sebanyak 6 sampel, suplemen kesehatan sebanyak 2 sampel dan kosmetik sebanyak 13 sampel. untuk jumlah laporan monitoring penarikan obat sebanyak 8 laporan, laporan monitoring penarikan obask sebanyak 0 laporan dan laporan monitoring kosmetik sebanyak 13 laporan.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%	100%	123,46%	Tercapai/ Melampaui	

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi capaian pada indikator ini s/d triwulan I masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui** dengan persentase capaian sebesar 123,46%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator ini capaian kinerja hingga triwulan I memperoleh kategori **Tidak Dapat Disimpulkan** hal ini dikarenakan target sampel sediaan farmasi yang direncanakan berdasarkan renlak sampling telah terrealisai seluruhnya sehingga mengakibatkan % capaiannya menjadi 123,46%.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu sampel-sampel yang hasil ujinya memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) telah dilaporkan melalui SIPT yang kemudian produsen dengan produk yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat (TMS) akan di tindak lanjuti oleh pusat sehingga produsen dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standar dan meningkatkan mutu dan keamanan dari produk serta melakukan

koordinasi dengan Balai penguji terkait sampel-sampel yang belum selesai uji.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring kegiatan sampling sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling		Monitoring kegiatan sampling sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling pada triwulan II	Tahun 2025	Kegiatan sampling sesuai dengan renlak	

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	100	123,46 %	Rp21.308.000	Rp15.986.950	75,08 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien dilihat dari persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan persentase capaian anggaran pada TW I. Hal ini dikarenakan Surat Edaran terkait efisiensi anggaran di awal tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja yang disusun setiap triwulan merupakan upaya untuk meningkatkan capaian indikator sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya. Pada indikator ini sampel-sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) akan ditindaklanjuti oleh pusat sehingga kedepannya produsen lebih ketat lagi dalam meningkatkan keamanan dan mutu produknya.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75%**	**100%**	**133,33%**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.

b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

c. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

d. Kriteria Pangan olahan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
   1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
   2. Produk kedaluwarsa
   3. Produk rusak
   4. Tidak memenuhi ketentuan label
   5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian, Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji.

Target triwulan I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 75% dengan realisasi sebesar 100% sehingga diperoleh persentase capaian triwulan I sebesar 133,33% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Jumlah sampel pangan olahan yang diuji sebanyak 16 sampel.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**75%**	**100%**	**133,33%**	**Tercapai/ Melampaui**	▲

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi capaian pada indikator ini s/d triwulan I masuk kedalam kategori **Tercapai/Melampaui** dengan persentase capaian sebesar 133,33%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator ini capaian kinerja hingga triwulan I memperoleh kategori Tidak Dapat Disimpulkan hal ini dikarenakan target sampel pangan olahan yang direncanakan berdasarkan renlak sampling telah terrealisai seluruhnya sehingga mengakibatkan % capaiannya menjadi 133,33%.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu sampel-sampel yang hasil ujinya memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) telah dilaporkan melalui SIPT yang kemudian produsen dengan produk yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat (TMS) akan di tindak lanjuti oleh pusat sehingga produsen dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standar dan meningkatkan mutu dan keamanan dari produk serta melakukan koordinasi dengan Balai penguji terkait sampel-sampel yang belum selesai uji.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring kegiatan sampling sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling		Monitoring kegiatan sampling sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling pada triwulan II	Tahun 2025	Pelaksanaan kegiatan sampling sesuai dengan renlak	-

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100	133,33 %	Rp19.022.000	Rp2.297.470	12,08 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien dilihat dari persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan persentase capaian anggaran pada TW I. Hal ini dikarenakan Surat Edaran terkait efisiensi anggaran di awal tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja yang disusun setiap triwulan merupakan upaya untuk meningkatkan capaian indikator sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya. Pada indikator ini sampel-sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) akan ditindaklanjuti oleh pusat sehingga kedepannya produsen lebih ketat lagi dalam meningkatkan keamanan dan mutu produknya.

3. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	-	**Indikator diexclude dari perhitungan capaian TW I**	

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

   1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan

   2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

4. Persentase Sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85%**	**100%**	**117,65%**	**Tidak Dapat Disimpulkan**

Indikator kinerja ini dapat diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
b. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
c. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
d. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).

Target triwulan I yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85% dengan realisasi sebesar 100% sehingga diperoleh persentase capaian triwulan I sebesar 117,65% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Jumlah sampel makanan targeted yang diuji sebanyak 5 sampel.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	**85%**	**100%**	**117,65%**	**Tercapai/ Melampaui**	

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi capaian pada indikator ini s/d triwulan I masuk kedalam kategori **Istimewa** dengan persentase capaian sebesar 117,65%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pada indikator ini capaian kinerja hingga triwulan I memperoleh kategori Tidak Dapat Disimpulkan hal ini dikarenakan target sampel PIRT berisiko yang direncanakan berdasarkan renlak sampling telah terrealisai seluruhnya sehingga mengakibatkan % capaiannya menjadi 117,65%.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu sampel-sampel yang hasil ujinya memenuhi syarat (MS) maupun tidak memenuhi syarat (TMS) telah dilaporkan melalui SIPT yang kemudian produsen dengan produk yang hasil ujinya tidak memenuhi syarat (TMS) akan di tindak lanjuti oleh pusat sehingga produsen dapat memperbaiki hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan standar dan meningkatkan mutu dan keamanan dari produk serta melakukan koordinasi dengan Balai penguji terkait sampel-sampel yang belum selesai uji.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Sampel sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan		Monitoring kegiatan sampling sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling	Tahun 2025	Kegiatan sampling sesuai perencanaan	

f. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Dengan adanya laporan kinerja yang disusun setiap triwulan merupakan upaya untuk meningkatkan capaian indikator sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya. Pada

indikator ini sampel-sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) akan ditindaklanjuti oleh pusat sehingga kedepannya produsen lebih ketat lagi dalam meningkatkan keamanan dan mutu produknya.

5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

a. Perbandingan Target Bulanan dengan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	15%	57.58%	383.87%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi pada TW I tahun 2025 sebesar 57.58% dimana persentase capaian sebesar 383.87% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Adapun persentasi rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan lintas sektor pada TW I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Nama Unit Kerja	Nama Indikator	Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	0,00	9,00	0,00

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	3,00	9,00	33,33
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	9,00	11,00	81,82

Nama Unit Kerja	Nama Indikator	Bulan	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	0,00	0,00	0,00
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	0,00	1,00	0,00
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	1,00	3,00	33,33

Nama Unit Kerja	Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	0,00	0,00	0,00	0,00
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	10,00	33,33	0,00	16,67
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	15,00	81,82	33,33	57,58

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	72%	57.58%	79.97%	Akan Tercapai	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW I sebesar 57.58% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 79.97%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Akan Tercapai**. Kegiatan ini berjalan sepanjang tahun 2025 sehingga diharapkan setiap TW nya akan mengalami peningkatan hingga mencapai target yang ditetapkan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja hingga persentase capaian pada TW I melebihi 110% adalah adanya pelaporan evaluasi CAPA dari hasil pemeriksaan tahun 2024 yang diterima di tahun 2025 yang menyebabkan capaian melebihi target bulanan yang telah ditetapkan. Untuk selanjutnya akan di pantau kembali rekomendai yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor agar tidak melebihi ataupun kurang dari target TW yang telah ditetapkan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah melakukan *follow up* ke pihak sarana (pelaku usaha maupun lintas sektor) agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	*follow up* ke pihak sarana (pelaku usaha maupun lintas sektor) agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.	-	Melakukan *follow up* ke pihak sarana (pelaku usaha maupun lintas sektor) agar segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan.	Tahun 2025	Terdapat rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti	-

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	15	57.58	383.87	376.000	376.000	100.00 %	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien dilihat dari persentase capaian indikator lebih tinggi dibandingkan persentase capaian anggaran pada TW I. Hal ini dikarenakan adanya pelaporan evaluasi CAPA dari hasil pemeriksaan tahun 2024 yang diterima pada tahun 2025.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indicator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya.

6. Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-

Tidak ada realisasi pada TW I tahun 2025 dikarenakan adanya perubahan renlak dimana kegiatan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi mulai dilaksanakan pada TW II. Adapun persentasi sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Nama Unit Kerja	Nama Indikator	Bulan	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.00%	0%	0%	Perlu Upaya Keras	▼

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW I sebesar 0% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 0%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Perlu Upaya Keras**.

c. Analisis Penyebab Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab kegagalan capaian kinerja pada Indikator ini adalah kegiatan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi mulai dilaksanakan pada TW II. Untuk selanjutnya akan dipantau kembali target yang telah ditetapkan dengan perencanaan tahunan yang telah disusun.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja adalah penetapan target tidak sesuai dengan perencanaan pelaksanaan pengawasan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi		Melakukan monitoring perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi	Tahun 2025	Capaian -	-

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase sarana produksi sediaan farmasi yang	0	0	0	376.000	376.000	100	Tidak Efisien

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah dibandingkan capaian anggaran TW I tahun 2025. Hal ini dikarenakan pengawasan sarana produksi sediaan farmasi mulai dilaksanakan pada TW II.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indicator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya.

7. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	- (indikator di exclude dari perhitungan capaian TW I)

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 %	-	-	-	-

Indikator di exclude dari perhitungan capaian TW I dikarenakan kertas kerja pada indikator ini masih dibahas perhitungannya dengan deputi pengampu

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dikarenakan indikator di exclude dari perhitungan capaian Triwulan I.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tidak terdapat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyatan kinerja dikarenakan indikator di exclude dari perhitungan capaian Triwulan I.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasaan sarana produksi pangan olahan		Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasaan sarana produksi pangan olahan	Tahun 2025	-	-

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase sarana produksi pangan olahan yang	90	-	-	2.632.000	2.632.000	100	Tidak Efisien

diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien karena capaian indicator belum dapat dihitung sehingga nilainya tidak dapat dibandingkan dengan capaian anggaran pada TW I.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik pada triwulan berikutnya.

8. Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-		- (indikator di exclude dari perhitungan capaian TW I)

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00%	-	-	-	-

Indikator di exclude dari perhitungan capaian TW I dikarenakan kertas kerja pada indikator ini masih dibahas perhitungannya dengan deputi pengampu

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Tidak terdapat analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dikarenakan indikator di exclude dari perhitungan capaian TW I.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tidak terdapat analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyatan kinerja dikarenakan indikator di exclude dari perhitungan capaian TW I.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distirbusi sediaan farmasi		Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi	Tahun 2025	Capaian -	-

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase fasilitas distribusi	92	-	-	27.106.500	27.106.500	100	Tidak Efisien

sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan							

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien karena capaian indicator belum dapat dihitung sehingga nilainya tidak dapat dibandingkan dengan capaian anggaran pada TW I.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indicator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya

9. Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85%	100.00%	117.65%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi pada TW I tahun 2025 sebesar 100.00% dimana persentase capaian sebesar 117.65% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**. Adapun persentasi fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Nama Unit Kerja	Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	2	2	2	20,00	2	2	70,00	2	2	10,00	100,00
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	8	8	8	20,00	8	8	70,00	8	8	10,00	100,00

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa	85%	100.00%	117.65%	Tercapai/Melampaui	▲

dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW I sebesar 100.00% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 117.65%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja hingga persentase capaian pada TW I melebihi 110% adalah realisasi telah sesuai dengan perencanaan dan telah dilaporkan tepat waktu serta kesesuaian ketepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Untuk selanjutnya akan terus dipantau perencanaan serta realisasi kegiatan ini.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distribusi pangan olahan		Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan sarana distirbusi pangan olahan	Tahun 2025	-	-

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100.00	117.65	4.417.100	4.417.100	100	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien karena capaian indicator lebih besar dibandingkan capaian anggaran pada TW I.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indicator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya.

10. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45%	99.73%	125.53%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi pada TW I tahun 2025 sebesar 99.73% dimana persentase capaian sebesar 125.53% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Adapun persentasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada TW I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Nama Unit Kerja	Nama Indikator	Bulan	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	100,00	100,00	100,00	0,00	85,00	96,25
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	100,00	100,00	100,00	100,00	92,86	98,57
Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	100,00	100,00	100,00	100,00	98,64	99,73

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45%	99.73%	125.53%	Tercapai/Melampaui	▲

Berdasarkan tabel diatas, realisasi TW I sebesar 99.73% dengan persentase capaian dibandingkan dengan target tahunan sebesar 125.53%. Kategori dari persentase capaian tersebut adalah **Tercapai**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun analisis penyebab keberhasilan peningkatan kinerja hingga persentase capaian pada TW I melebihi 110% adalah realisasi telah sesuai dengan perencanaan dan telah dilaporkan tepat waktu serta kesesuaian ketepatan pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya akan terus dipantau perencanaan serta realisasi kegiatan ini.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja adalah melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan		Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi iklan sediaan farmasi dan pangan olahan	Tahun 2025	-	-

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Persentase fasilitas distribusi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	79.45	99.73	125.53	376.000	376.000	100	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien karena capaian indicator lebih besar dibandingkan capaian anggaran pada TW I.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indicator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya.

11. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3	3.30	109.90%	Baik

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11%	3.30%	30%	Perlu Upaya Keras	

Perhitungan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Tier I khusus Loka POM merupakan penilaian yang dihitung berdasarkan pembobotan dari komponen yang terdiri atas Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar

Peralatan dan Standar Kompetensi Laboratorium. Berdasarkan perhitungan menggunakan matriks yang telah disediakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan, maka didapatkan nilai pemenuhan Lab pengujian sediaan farmasi dan Pangan Olahan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sebesar 3,30% dari target TW I yaitu 3%, sehingga persentase capaian adalah sebesar 109,9%. Sedangkan capaian terhadap target tahun 2025 yaitu sebesar 11%, sehingga persentase capaian TW I terhadap target tahunan adalah sebesar 30% dengan kategori capaian "Perlu Upaya Keras".

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pemenuhan nilai Standar Kemampuan Laboratorium memiliki beberapa kendala, diantaranya:

- Belum memiliki gedung / ruangan khusus yang digunakan sebagai laboratorium, tidak ada anggaran untuk pembangunan maupun renovasi gedung
- Belum memiliki kompetensi personel dengan jumlah yang cukup dan pereaksi untuk melakukan pengujian mikrobiologi dan OTSKKos
- Belum tersedia test kit parameter uji Arsen, Sianida, Nitrit, dan Pb untuk pengujian pangan
- Pemenuhan standar peralatan tergantung dari ketersediaan anggaran.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja indikator "Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu" diantaranya adalah :

- Pengadaan test kit pangan untuk parameter uji Arsen, Sianida, Nitrit, dan Pb

- Meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup dengan melakukan uji rapid kimia obat dengan parameter pengujian uji reaksi warna, waktu hancur dan uji semikuantitatif dengan menggunakan KLT, serta melakukan verifikasi metode pengujian untuk masing-masing zat aktif yang akan diujikan.
- Menyusun program pelatihan personel untuk pengujian rapid kimia obat dan mikrobiologi.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan nilai bobot komponen Standar Ruang Lingkup (SRL)		Meningkatkan nilai Standar Ruang Lingkup dengan melakukan uji rapid kimia obat dengan parameter pengujian uji reaksi warna, waktu hancur dan uji semikuantitatif dengan menggunakan KLT, serta melakukan verifikasi metode pengujian untuk masing-masing zat aktif yang akan diujikan.	TW II – TW IV 2025	0	30%

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3	3.3	109,9%	0	0	0	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien. Realisasi kinerja TW I merupakan baseline dari kinerja pada tahun 2024 dan pengujian pangan dengan menggunakan anggaran pengawasan pangan jajanan. Belum ada realisasi anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran di awal tahun. Penggunaan anggaran direncanakan pada triwulan selanjutnya.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk mencapai hasil kinerja yang lebih baik pada triwulan berikutnya.

12. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,76%	86,46%	102,01%	Sangat Baik

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan penerimaan audiens KIE Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE

3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan atau menerima produk informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam 1 bulan terakhir.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:

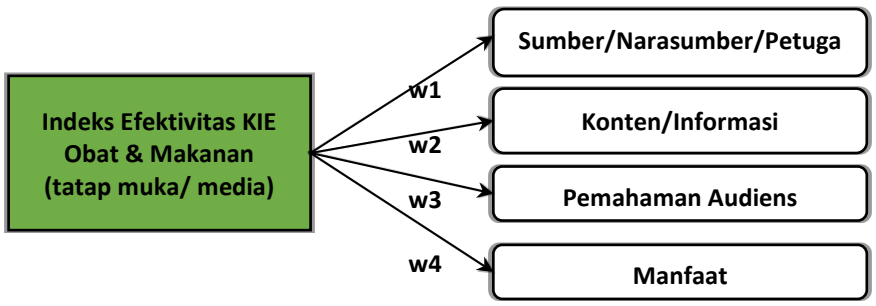

Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan (Tatap Muka/ media)	(0.25 x w1)+(0.25 x w2)+(0.25 x w3)+(0.25 x w4)

Dengan kategori penilaian:

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif

75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

Capaian indikator kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah 86,46% dengan target paada Triwulan I sebesar 84,76% dengan persentase capaian sebesar 102,01% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,76%	86,46%	102,01%	Tercapai/ Melampaui	▲

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW I tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "Tercapai/Melampaui" dengan realisasi 84,76% dan persentase capaian 102,01% dari target untuk tahun 2025 sebesar 84,76%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan Atau Peningkatan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Terdapat berbagai upaya dan kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya:

- Adanya pemilihan media informasi dan/atau metode KIE yang disesuaikan agar tepat sasaran ke masyarakat dan kegiatan KIE yang

lebih menarik sehingga berdampak positif terhadap pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan yang aman;

- Keberagaman media yang digunakan dalam penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang diberikan;
- KIE media dibuat dengan semenarik mungkin dan mengikuti tren yang ada namun tetap menyesuaikan dengan pedoman.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Terdapat berbagai kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut, diantaranya:

- pemilihan media informasi dan/atau metode KIE yang sesuai agar tepat sasaran ke masyarakat;
- Keberagaman media yang digunakan dalam penyebaran informasi terkait obat dan makanan yang diberikan;
- Menggunakan berbagai ragam media untuk sosialisasi dan KIE mengenai Obat dan Makanan misalnya melalui media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, dan video sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat;
- Peningkatan frekuensi tayangan atau konten informatif dan menarik melalui media elektronik/cetak dan memilih media yang paling banyak diakses oleh masyarakat.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Penetapan peserta KIE disesuaikan dengan target terutama prioritas Stunting	-	Melaksanakan KIE dengan menyesuaikan antara peserta, tema dan isu terbaru dengan memperhatikan gender.	TW IV Tahun 2025	-	-

13. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0%	0%	0%	-

Tidak ada target dan realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 ini. Kegiatan akan mulai dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025.

14. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman	0%	0%	0%	-

Tidak ada target dan realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 ini. Kegiatan akan mulai dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025.

15. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0%	0%	0%	-

Tidak ada target dan realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 ini. Kegiatan akan mulai dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2025.

16. Persentase UMKM yang didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang Baik dan/Atau IP-CPPOB Pangan Olahan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10%	10%	100%	Baik

Target pendampingan UMKM Obat dan Makanan yang memenuhi standar produksi sesuai dengan pedoman Cara Produksi yang baik pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 UMKM. Sampai dengan TW I (Maret 2025) kegiatan pendampingan telah dilaksanakan dengan realisasi 1 sarana sudah memenuhi syarat. Selain itu telah dilaksanakan tahapan penetapan target pendampingan UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik di tahun 2025.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100%	10%	10%	Akan Tercapai	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW I tahun 2025 telah belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Akan Tercapai” dengan realisasi 10% dan persentase capaian 10% dari target untuk tahun 2025 sebesar 100%. Persentase realisasi masih sesuai dengan target Triwulan I yaitu 10% dengan persentase capaian sebesar 100%. Masih ada tahapan progress pendampingan yang harus

dipenuhi yaitu bimbingan teknis, fasilitasi pendampingan UMKM, Sertifikasi serta monitoring dan pelaporan sampai akhir tahun 2025 untuk memenuhi persentase capaian sebesar 100%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Persentase capaian sebesar 10% dengan kategori Akan Tercapai. Hal ini dikarenakan masih ada progress tahapan pendampingan yang sedang berjalan, yaitu bimbingan teknis, fasilitasi pendampingan, sertifikasi, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan UMKM Obat dan Makanan.

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelasanaan	Target UMKM Tahun N	Target UMKM s.d Tahun N	s.d Bulan		
								Januari	Februari	Maret
Obat Bahan Alam						1	0			
	1	Penetapan target UMKM obat bahan alam	10 %	10 %	Februari s.d Februari			0	0	10
	2	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	20 %	30 %	Maret s.d April			0	0	0
	3	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	40 %	70 %	April s.d Oktober			0	0	0
	4	Sertifikasi	20 %	90 %	September s.d Desember			0	0	0
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10 %	100 %	September s.d Desember			0	0	0

Total Progres								0	0	10
Pangan										
	1	KIE/ Sosialisasi Keamanan Pangan	5%	5 %	Januari s.d Maret	3	1	0	0	0
	2	Penetapan UMK Pangan Olahan Target	10 %	15 %	Maret			0	0	10
	3	Bimtek CPPOB	30 %	45 %	Maret s.d April			0	0	0
	4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	50 %	95 %	April s.d Oktober			0	0	0
	5	Monev dan Pelaporan	5 %	100 %	Novembers.d Desember			0	0	0
Total Progres								0	0	10
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						4	1	0	0	30

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja indikator "Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, KOS yang baik dan/ atau IP-CPPOB Pangan Olahan" diantaranya adalah :

- Melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada Pelaku Usaha UMKM, sehingga UMKM dapat segera mendapatkan solusi terkait kendala yang dihadapi dalam mendapatkan sertifikat pemenuhan dalam proses mendapatkan izin edar di Badan POM.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Fasilitasi pendampingan UMKM dalam memenuhi persyaratan cara produksi yang baik		Melakukan monitoring progres tahapan pendampingan UMKM	Tahun 2025	Realisasi 10%	Realisasi 10%

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	91	10	10.98	0	0	0	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa belum ada penggunaan sumber daya/anggaran pada Triwulan ini, disebabkan tahapan pendampingan yang dilakukan hanya berupa penetapan target UMKM yang akan didampingi selama tahun 2025 selain itu blokiran efisiensi anggaran yang dilakukan pusat juga menjadi salah satu faktor penyebab.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indikator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya

17. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW II	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	50%	66,67%	133,34%	Tidak Dapat Disimpulkan

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara preventif dan represif. Pada indikator ini, kegiatan Penindakan berupa kegiatan represif yaitu kegiatan intelijen, operasi Penindakan, dan Pemberkasan.

Sampai dengan Triwulan I (Januari-Maret) 2025, sudah dilakukan kegiatan intelijen dan dilakukan pelaporan berupa Laporan Informasi (LI) sebanyak 3 (tiga) laporan. Hasil dari seluruh kegiatan diinput melalui Aplikasi dashboard Penindakan. Kegiatan intelijen yang dilaksanakan dalam pengumpulan bahan keterangan yang mana bahan keterangan tersebut dijadikan sebagai data awal dalam pelaksanaan operasi Penindakan dan pemberkasan.

Selain itu, selama proses penelusuran kasus dalam periode triwulan I ini, petugas menemukan masih samanya modus distribusi produk yaitu banyak yang melalui online terutama media sosial. adanya modus baru dari pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya. Dalam hal ini, petugas tetap melakukan koordinasi baik internal UPT maupun eksternal guna memperoleh informasi lebih lanjut, dan saat adanya kendala terkait dengan tindak lanjut, petugas juga melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Penindakan BPOM ataupun dengan lintas sektor terkait.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW II terhadap Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	70%	0%	0%	Perlu Upaya Keras	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW I tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria "perlu Upaya keras" dengan realisasi 0% dan persentase capaian 0% dari target untuk tahun 2025 sebesar 70% dikarenakan untuk adanya realisasi harus adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan. Target Loka POM di Kab. Aceh Selatan akan dilaksanakan di TW III tahun 2025.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indikator ini memperoleh kategori kurang. Adapun analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja dikarenakan belum terbitnya SPDP yang merupakan awal dari perhitungan target. Alternatif solusi yang dilakukan yaitu segera berkoordinasi dengan lintas sektor dan menyegerakan penyelesaian pulbaket terhadap target operasi untuk mencapai target tahun 2025.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu melakukan koordinasi dengan lintas sektor seperti Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan BAIS.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan koordinasi dan diskusi terkait informasi penunjang dalam pulbaket		Berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mendapatkan informasi penunjang pulbaket		-	Mendapatkan informasi tambahan
2.	Melakukan pulbaket pada target operasi		1. Cover ke target operasi 2. Turun agen ke target operasi 3. Gelar kasus terkait hasil pulbaket		-	Pulbaket A1

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70	0	0%	106.440.000	6.050.000	5.68%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien dikarenakan masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Perlu dilakukan reviu perencanaan kegiatan penindakan agar target tahun 2025 segera tercapai

18. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50%	55,56%	101%	**Sangat Baik**

Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan melakukan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara preventif dan represif. Pengawasan dalam bentuk preventif dilakukan baik pada fungsi pemeriksaan, infokom maupun penindakan. Pada fungsi penindakan, terdapat beberapa kegiatan preventif antara lain kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan obat dan makanan, pengawasan kejahatan obat dan makanan secara daring (patroli siber). Dari kegiatan tersebut dihasilkan Data Kerawanan Kejahatan, Laporan Patroli Siber, dan profiling, untuk ditindaklanjuti berupa pembinaan ataupun ditelusuri lebih lanjut. Jika kegiatan preventif sudah dilaksanakan namun masih tetap ditemukannya ada kejahatan obat dan makanan, maka upaya selanjutnya dapat dilakukan tindakan respresif yaitu operasi penindakan kejahatan obat dan makanan.

Sampai dengan Triwulan I (Januari-Maret) 2025, data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan telah dilaporkan sebanyak 9 (sembilan) kasus pada Aplikasi Dashboard Penindakan pada menu rawan kejahatan. Laporan patroli siber sebanyak 16 (enam belas) tautan yang di dominasi dengan komoditi kosmetika telah dilaporkan untuk rekomendasi penurunan/penutupan konten. Profiling sebanyak 3 (tiga) sarana. Hasil

dari seluruh kegiatan diinput melalui Aplikasi dashboard Penindakan dan *inawebcrawler*.

Selain itu, selama proses penelusuran kasus dalam periode triwulan I ini, petugas menemukan masih samanya modus distribusi produk yaitu banyak yang melalui online terutama media sosial. adanya modus baru dari pelaku usaha untuk mendistribusikan produknya. Dalam hal ini, petugas tetap melakukan koordinasi baik internal UPT maupun eksternal guna memperoleh informasi lebih lanjut, dan saat adanya kendala terkait dengan tindak lanjut, petugas juga melakukan koordinasi dengan Deputi Bidang Penindakan BPOM ataupun dengan lintas sektor terkait.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	90%	50%	55,56%	Perlu Upaya Keras	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW I tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “perlu Upaya keras” dengan realisasi 50% dan persentase capaian 55,56% dari target untuk tahun 2025 sebesar 90%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Indikator ini memperoleh kategori kurang. Adapun analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja dikarenakan dalam indikator ini terdiri dari laporan peta rawan kasus, laporan siber, profiling, pembuatan laporan analisis dan, tindak lanjut rekomendasi analisis, yang mana laporan analisis dan tindak lanjut rekomendasi analisis dilaksanakan pada akhir

TW sehingga capaian Loka POM di Kab. Aceh Selatan pada indikator ini dalam kategori kurang. Solusi yang akan dilaksanakan adalah mulai menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait data yang dibutuhkan sehingga pada awal TW IV, target 2025 sudah tercapai.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun upaya yang dilakukan untuk dapat menunjang keberhasilan capaian kinerja yaitu menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan dan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait data yang dibutuhkan.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan laporan		1. Merekap data peta rawan kasus yang sudah diinput 2. Membuat Kesimpulan terhadap hasil inputan 3. Menyiapkan data dukung kajian dan laporan sesuai dengan pedoman	TW II	-	Data yang dibutuhkan sudah terkumpul
2.	Melakukan koordinasi dan diskusi terkait dengan data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan		Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan data yang sudah dikumpulkan.	TW II	-	Data laporan sudah lengkap

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	55,56	101%	45.455.000	340.000	0,74%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran dalam mencapai kinerja tidak efisien dikarenakan masih dilaksanakannya kegiatan dan terdapatnya blokir anggaran pada KRO yang melekat pada indikator ini.

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Perlu dilakukan reviu perencanaan kegiatan penindakan agar target tahun 2025 segera tercapai.

19. Indeks Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik UPT	0%	0%	0%	-

Tidak terdapat realisasi sampai akhir tahun.

20. Nilai AKIP UPT

a. Perbandingan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP UPT	0	0	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir TW I.

21. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

a. Perbandingan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	0	0.00%	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir TW I

22. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

a. Perbandingan Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TW I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0%	Realisasi akhir tahun

Tidak terdapat realisasi sampai akhir TW I.

23. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I

Indikator Kinerja	Target Tw I	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	25	25.0%	100.00%	Baik

Kinerja Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan yang telah disusun pada awal tahun oleh Tim RB. Adapun realisasi indikator tersebut pada triwulan I tahun 2025 adalah 50% dengan capaian kinerja adalah 100% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan Target dan Realisasi TW I terhadap Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi TW I	% Capaian	Kategori	Notifikasi Warna
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	100	25%	25.00%	Akan Tercapai	

Capaian Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada TW I tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan dengan mendapatkan nilai dengan kriteria “Akan Tercapai” dengan realisasi 50% dan persentase capaian 50.00% dari target untuk tahun 2025 sebesar 100%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Pencapaian Presentase Implementasi Rencana Aksi RB di Loka POM Kabupaten Aceh Selatan dapat berhasil karena terpenuhinya aspek

penilaian berupa penyusunan, Proses perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian *Project Plan Action* program/kegiatan agen perubahan yang mendukung implementasi rencana aksi RB, diantaranya kegiatan GEMAR (Gerakan Jumat Aktif dan Rutin), Kantin Religi (Kajian Rutin yang dilaksanakan pertriwulan), SIPALA (Sistem Pendampingan Pelaku Usaha dengan Metode Jemput Bola), serta Anugerah Pegawai Terbaik (*Employee of the Three Months*).

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Ketercapaian indikator implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi didukung karena adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai unit untuk dapat melakukan peningkatan terhadap kapasitas dan akuntabilitas organisasi yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik, misalnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan adanya pelaksanaan kegiatan yang mendukung reformasi birokrasi dengan penataan manajemen Sumber daya Manusia yang lebih baik untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pelaksanaan kegiatan RB secara konsisten		Melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan plan of action rencana aksi RB secara periodik dan tepat waktu	Tahun 2025	Capaian 100%	Capaian 100%

f. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator Kinerja	Volume			Anggaran			Tingkat efiensi
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	75,00	75,00	100,00 %	Rp693.914.800	Rp510.768.894	73,61 %	Tidak Efisien

g. Informasi tentang pemanfaat laporan kinerja

Laporan kinerja interim digunakan sebagai bahan dalam upaya untuk meningkatkan capaian indicator melalui evaluasi dan perbaikan hasil capaian pada triwulan selanjutnya

3.2. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan kinerja yang disusun secara periodik merupakan hasil analisis terhadap monitoring dan evaluasi, baik terkait kinerja dan pemanfaatan sumber daya. Hasil analisis yang disajikan dapat menjadi basis data untuk penentuan strategi dalam mengatasi kendala maupun meningkatkan kinerja dan sebagai dasar penyusunan perencanaan di periode berikutnya. Pada Laporan Kinerja disampaikan rekomendasi perbaikan, usulan rencana aksi dalam rangka upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

3.3. Realisasi Anggaran

Capaian Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA- 063.01.2.690481/2025 yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 dengan anggaran awal sebesar Rp. 3.444.778.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). mengalami perubahan dalam rangka penambahan anggaran belanja barang berupa honor PPNPN sebesar Rp.35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran menjadi sebesar Rp.3.479.978.000,- (tiga milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Perhitungan capaian efektifitas realisasi anggaran sampai dengan Maret 2025 dapat diukur dari beberapa indikator diantaranya yaitu:

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Output

No	Kegiatan/KRO/ RO	Uraian RO	Volume			Anggaran		
			Target setahun	Realisasi s.d Triwulan I (Jan-Mar)	Capaian s.d Triwulan I (Jan-Mar)	Pagu	Realisasi s.d Triwulan I (Jan-Mar)	Capaian s.d Triwulan I (Jan-Mar)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21,43%	Rp45.455.000	Rp340.000	0,75%
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	8	1	12,50%	Rp38.607.000	Rp510.000	1,32%
3	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	95	0	0,00%	Rp67.961.000	Rp3.860.000	5,68%
4	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0,00%	Rp111.000.000	Rp23.374.298	21,06%

5	3165.BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	24	4	16,67%	Rp40.337.000	Rp5.141.500	12,75%
6	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2	0	0,00%	Rp14.000.000	Rp0	0,00%
7	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	0	0,00%	Rp50.000.000	Rp0	0,00%
8	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1	0	0,00%	Rp124.953.000	Rp0	0,00%
9	3165.QCD.U14	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI LOKA POM KAB ACEH SELATAN	1	0	0,00%	Rp106.440.000	Rp6.050.000	5,68%
10	3165.QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	0,00%	Rp93.572.000	Rp0	0,00%
11	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	1	0	0,00%	Rp150.802.000	Rp0	0,00%
12	3165.QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0,00%	Rp99.224.000	Rp0	0,00%
13	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	4	1	25,00%	Rp24.918.000	Rp0	0,00%
14	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	163	21	12,88%	Rp63.590.000	Rp3.282.100	5,16%
15	3165.QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	274	29	10,58%	Rp75.996.000	Rp15.986.950	21,04%
16	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	20	1	5,00%	Rp15.805.000	Rp3.760.000	23,79%

17	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	226	26	11,50%	Rp317.923.000	Rp31.523.600	9,92%
18	6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	0,00%	Rp8.000.000	Rp0	0,00%
19	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	0,00%	Rp2.031.395.000	Rp421.921.793	20,77%
Total			**841**	**86**	**10,23%**	**Rp3.479.978.000**	**Rp515.750.241**	**14,82%**

Adapun rencana Aksi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan diantaranya yaitu:

1. Pemberian Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan melalui pemberian informasi melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), publikasi melalui media cetak elektronik dan Media sosial;
2. Fasilitasi dan Pembinaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis, Penyampaian Informasi atau Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
3. Pembinaan UMKM melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis atau KIE kepada Pelaku usaha UMKM Obat dan Makanan;
2. Pemberian Layanan Sertifikasi melalui optimalisasi kegiatan perjalanan dinas dalam rangka asistensi untuk kegitan sertifikasi;
3. Pengawasan Sarana Produksi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan;
4. Pengawasan sarana Distribusi melalui optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling sesuai dengan perencanaan sampling yang telah disusun selama satu tahun berdasarkan pedoman sampling serta petunjuk teknis regionalisasi laboratorium;

6. Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan melalui kegiatan pelaksanaan tindak pidanan di bidang Obat dan Makanan; dan
7. Layanan Perkantoran melalui optimalisasi belanja pegawai dan belanja keperluan perkantoran sesuai dengan kebutuhan

Selain itu juga akan dilaksanakan pemenuhan Rencana Aksi melalui penguatan koordinasi pengawasan yang diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor
2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi profesi
3. Melakukan pengawasan gabungan bersama lintas sektor

2. Capaian kinerja dan realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan Maret 2025

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
			Target s.d Tw I (Mar)	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	g	h	i=(h/gx100)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	100,00	123,46%	Rp75.996.000	Rp15.986.950	21,04%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	100,00	133,33%	Rp44.513.000	Rp2.297.470	5,16%
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100,00	100,00%	Rp6.359.000	Rp328.210	5,16%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100,00	117,65%	Rp12.718.000	Rp656.420	5,16%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	15	57,58	383,87%	Rp1.580.500	Rp376.000	23,79%

		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	Rp1.580.500	Rp376.000	23,79%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	-	-	Rp11.063.500	Rp2.632.000	23,79%
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	-	-	Rp220.982.100	Rp27.106.500	12,27%
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100,00	117,65%	Rp96.940.900	Rp4.417.100	4,56%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79,45	99,73	125,53%	Rp1.580.500	Rp376.000	23,79%
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	3	3,30	109,90%	Rp124.953.000	Rp0	0,00%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84,76	86,46	102,01%	Rp108.298.000	Rp9.001.500	8,31%
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0,00	0,00%	Rp93.572.000	Rp0	0,00%
		Jumlah desa pangan aman	0	0,00	0,00%	Rp150.802.000	Rp0	0,00%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0,00	0,00%	Rp99.224.000	Rp0	0,00%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	10,00	100,00%	Rp24.918.000	Rp0	0,00%

5	Terlaksanana Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0,00	0,00%	Rp79.830.000	Rp4.537.500	5,68%
6	Terlaksanana kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	50	50,00	100,00%	Rp45.455.000	Rp340.000	0,75%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	Rp38.607.000	Rp510.000	1,32%
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	Rp557.086.750	Rp111.324.023	19,98%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	Rp579.152.750	Rp112.836.523	19,48%
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	Rp552.382.750	Rp111.324.023	20,15%
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	25,00	100,00%	Rp552.382.750	Rp111.324.023	20,15%
						Rp3.479.978.000	**Rp515.750.241**	**14,82%**

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala setiap minggu, melakukan revisi anggaran sesuai dengan prinsip efektifitas dan efisiensi, melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp.515.750.241,- dari total anggaran Rp.3.479.978.000,- atau sebesar 14,82%

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE), sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\%\ capaian\ output}{\%\ capaian\ input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1 (satu). Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tingkat Efisien dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Dari perhitungan Tingkat Efisiensi (TE) dari pengukuran efisiensi serapan anggaran Triwulan I Tahun 2025 terhadap 8 (delapan) sasaran kegiatan yang telah dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan, 4 sasaran kegiatan disimpulkan Tidak Efisien dan 4 Sasaran kegiatan belum dapat dihitung dikarenakan kegiatan sudah dilaksanakan namun realisasi anggaran belum dapat digunakan, begitu pula sebaliknya.

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Output	Input	IE	TE	Capaian TE
a	b	c		i=(h/gx100)			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	157.35 %	14.85%	10.6	9.6	Tidak Efisien
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT					
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi					

		dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder					
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan					
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	109.90 %	#DIV/0!	-	-	N/A
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	102.01 %	8.31%	12.27	11.3	Tidak Efisien
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan					
		Jumlah desa pangan aman					
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas					

4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100.00 %	#DIV/0!	-	-	N/A
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0.00%	5.68%	-	-	N/A
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar	100.00 %	0.75%	133.69	132.7	Tidak Efisien
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	1.32%	-	-	N/A
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	100.00 %	19.94%	5.01	4.01	Tidak Efisien
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM					
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM					
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT					

Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Hal yang telah dilakukan dalam upaya mencapai efisiensi anggaran yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran dilakukan secara rutin setiap awal bulan untuk mengevaluasi bulan sebelumnya, pemanfaatan revisi halaman III DIPA untuk memperbaiki rencana penarikan anggaran, serta perbaikan penganggaran menyesuiakan kebutuhan kegiatan melalui revisi POK.

BAB IV
PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan kinerja dan anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan pada Triwulan I Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan yaitu 8 Sasaran Kegiatan dengan 23 Indikator Kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan 2 program yaitu pengawasan Obat dan Makanan dan Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan adalah **106,54%** dengan predikat **Istimewa**. Secara umum pencapaian untuk Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

- Terdapat 8 (Delapan) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai >100% atau predikat Sangat Baik;
- Terdapat 3 (Tiga) Indikator Kinerja tercapai dengan nilai 100% atau predikat Baik;
- Terdapat 3 (Tiga) Indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NKO disebabkan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I;
- Terdapat 9 (Sembilan) Indikator yang belum dapat dievaluasi pada perhitungan NKO disebabkan tidak memiliki target pada Triwulan I Tahun 2025.

Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan sampai dengan Triwulan I sebesar Rp.515.750.241,- dari total anggaran Rp.3.479.978.000,- atau sebesar 14,82%.

2. Saran

Untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang serta agar pengawasan Obat dan Makanan dapat lebih optimal, maka perlu dilakukan upaya-upaya, yaitu:

1. Peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak eksternal maupun internal yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja.
2. Pengembangan rencana aksi sebagai langkah perbaikan terhadap kendala yang dihadapi.
3. Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait dengan modus kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Selatan untuk meninjau dan menindaklanjuti kasus kejahatan Obat dan Makanan, sehingga tercapainya kinerja pada tahun 2025.
4. Mengupayakan keselarasan pemanfaatan sistem data dan informasi dengan komponen penilaian dan memastikan penyajian informasi secara memadai.
5. Melakukan rekapitulasi dan penyusunan Laporan Kinerja secara lengkap dan sesuai pedoman.

LAMPIRAN

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KAB. ACEH SELATAN
Jl. Ahmad Yani No.5 Tapaktuan, Aceh Selatan 23715
Email : loka_acehselatan@pom.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR HK.02.02.2C.09.24.77 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

Menimbang :

a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Reoublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Selatan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Selatan
pada tanggal 18 September 2024
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

INDERA PERMANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

NOMOR HK.02.02.2C.09.24.77 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	92.6
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	82
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	81

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3.75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	75,45
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	89.9
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.2
		Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	100

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH SELATAN

INDERA PERMANA

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: INDERA PERMANA
Jabatan	: Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Aceh Selatan, 12 Februari 2025

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
INDERA PERMANA	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	72
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	84.76
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		03 - Jumlah desa pangan aman	1
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	3.51
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	77.5
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	4
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.825
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,444,778,000 (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,440,583,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,004,195,000

Aceh Selatan, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan

INDERA PERMANA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH SELATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	75,996,000
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	44,513,000
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	6,359,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	12,718,000
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	10	15	20	25	30	40	50	60	70	72	72	1,580,500
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				87	87	87	87	87	87	87	87	87	1,580,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	11,063,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	220,982,100
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	96,940,900
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	79.45	1,580,500
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			3	3	3	6	6	6	9	9	9	11	124,953,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	84.76	108,298,000
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	2	93,572,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	0	50	75	75	100	100	100	100	100	1	150,802,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	0	25	50	75	100	100	100	100	100	1	99,224,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	10	30	45	60	75	80	85	90	91	91	24,918,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	0	0	0	0	0	15	40	75	75	75	75	79,830,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	45,455,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												3.51	38,607,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												77.5	548,286,750
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												4	570,352,750
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.825	543,582,750
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	91	100	543,582,750
														Total	3,444,778,000